

**ANALISIS SISTEM INFORMASI PEMBERIAN KREDIT  
PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
(STUDI PADA BANK BRI (PERSERO) TBK  
KANTOR UNIT SYAMSUDIN NOOR)**

**Rory Handriano**  
**roryndo\_plk@yahoo.com**

**STIE NASIONAL BANJARMASIN**

*Abstract,*

*This research aims to determine the management activities of management in Banking, especially concerning the methods Analysis System financial information in order to implement the precautionary principle (Prudential Banking) in channeling credit by one state-owned bank in South Kalimantan, where specifically the analysis was conducted to determine real picture, systematic, and accuracy in terms of Lending.*

*The method used is descriptive qualitative method to view the credit information system is adequate and can be implemented comprehensively in PT BRI (Tbk) Unit Office Syamsudin Noor, so that the level of risk value NPL / Non Performing Loan (NPL) can be reduced.*

*This research found that the technical Lending by PT BRI (Tbk) Unit Office Syamsudin Noor is still not right. This is caused because of the number of human resources or expertise available is still limited, and there are no sudden inspection (Suprizer Auditor) to see the data that is required, so often happens abuse. Data verification procedures, interviews with prospective customers, and transactions of collateral that is often performed by a customer service (due to lack of human resources) resulted in a double data verification, where the elements of the documents are missing terms or data that is not requested by the customer service. Side implementation of direct visits (On The Spot) to a prospective borrower is still not optimal, so that the precautionary principle and the bank's operations do not run in accordance with established procedures.*

*Keywords: Prudential Banking, Non Performing Loan, Suprizer Auditor, On The Spot*

*Abstrak,*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan pengelolaan manajemen dibidang Perbankan khususnya yang menyangkut metode Analisis Sistem Informasi keuangan dalam upaya menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam menyalurkan Kredit oleh salah satu Bank BUMN di wilayah Kalimantan Selatan, dimana secara khusus analisis ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata, sistematis, dan akurasi dalam hal Penyaluran Kredit.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk melihat sistem informasi pemberian kredit yang memadai dan dapat diterapkan secara komprehensif pada PT BRI (Tbk) Kantor Unit Syamsudin Noor, agar tingkat risiko kredit bermasalah / *Non Performing Loan* (NPL) dapat berkurang.

Penelitian ini menemukan bahwa teknis Penyaluran kredit oleh PT BRI (Tbk) Kantor Unit Syamsudin Noor masih belum tepat. Ini disebabkan karena faktor jumlah atau keahlian SDM yang tersedia masih terbatas, dan belum adanya pemeriksaan mendadak (*Supriser Auditor*) untuk melihat data-data yang diperlukan, sehingga seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang. Prosedur verifikasi data, wawancara langsung dengan calon nasabah, dan melakukan transaksi agunan yang seringkali dilakukan oleh bagian *customer service* (karena kekurangan SDM) mengakibatkan terjadinya double data verifikasi, dimana dari unsur dokumen terdapat syarat atau data yang terlewatkan yang tidak diminta oleh *customer service*. Disisi pelaksanaan kunjungan langsung (*On The Spot*) ke tempat calon debitur masih belum dilakukan secara optimal, sehingga prinsip kehati-hatian dan operasional bank tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Kata Kunci : *Prudential Banking, Non Performing Loan, Supriser Auditor, On The Spot*

Tujuan pembangunan nasional yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat, maka pemerintah mengarahkan khususnya pada bidang ekonomi, dimana pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan di dunia usaha yang dilaksanakan melalui langkah-langkah dan kebijaksanaan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan yang diharapkan. Diantara berbagai kebijakan ekonomi yang

dilaksanakan, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah karena bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga bank dituntut peran sertanya untuk menyukseskan pembangunan melalui jasa kredit yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Pemberian kredit sangat berguna bagi masyarakat karena dapat meningkatkan perekonomian mereka dalam daya guna suatu barang atau jasa. Pemberian kredit

mengandung risiko tertentu, sehingga pihak bank tidak begitu saja memberikannya. Kredit investasi akan diberikan apabila manajemen bank merasa yakin bahwa nasabahnya dapat mengembalikan kredit investasi tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati, baik pokok ataupun bunga pinjaman yang ditetapkan, sehingga bank dapat menghindari diri dari tidak tertagihnya kredit tersebut, yang nantinya akan menimbulkan masalah kredit macet. Kredit macet yang terjadi terutama disebabkan oleh faktor manajemen bank dalam melakukan analisis kredit yang tidak akurat, faktor penguasaan kredit yang lemah, analisis laporan keuangan yang tidak cermat dan kompetensi dari sumber daya manusia yang masih lemah.

PT BRI (Persero) Tbk sebagai salah satu bank pemerintah yang bergerak dalam usaha jasa perbankan, berupaya memberikan pelayanan jasa kepada para nasabah, salah satu bentuk pelayanan jasa tersebut adalah pemberian kredit dalam beragam fasilitas. Hal ini dilakukan penelitian tentang metode

Analisis Sistem Informasi keuangan dalam upaya menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam menyalurkan Kredit yang dilakukan oleh PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor. Besarnya realisasi kredit yang disalurkan oleh PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor tidak selalu sama setiap tahunnya. Realisasi kredit tersebut kemudian akan menghasilkan kualitas dari masing-masing jenis kredit yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Penggolongan kualitas kredit (kolektibilitas kredit) tersebut didasarkan kepada tingkat kelancaran pembayaran kewajiban, baik bunga maupun pokok pinjaman. Berdasarkan penggolongan kualitas kredit tersebut nantinya akan dapat diketahui rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan *Performing Loan* (PL) atas kredit yang telah disalurkan.

*Non Performing Loan* (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit

bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, oleh karena itu setiap bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas

perbankan. Kredit bermasalah adalah jumlah keseluruhan dari kredit kurang lancar, ditambah kredit diragukan, dan kredit macet. Rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPL} = (\text{Total NPL} / \text{Total Kredit}) \times 100\%$$

*Non Performing Loan* (NPL) sangat menentukan dalam penilaian tingkat kesehatan Bank, Bank yang memiliki nilai NPL lebih dari 5% bisa dikategorikan tidak sehat. Oleh karena itu untuk memelihara kelangsungan usahanya Bank perlu meminimalkan potensi kerugian yang akan muncul dikarenakan adanya kredit macet tersebut, salah satunya dengan mengoptimalkan kebijakan-kebijakan Bank dalam hal kredit yang tertuang dalam Standar Operasional Perusahaan dan dilakukannya pengawasan dalam hal pemberian kredit. Sebelum memberikan kredit seorang pimpinan

atau pejabat yang berwenang dalam memutuskan kredit harus memperhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan kredit seperti: siapa yang menginginkan kredit, untuk apa kredit digunakan, apa dan berapa nilai agunannya, dan bagaimana dan berapa lama kredit akan dikembalikan kepada bank dan beberapa pertimbangan lainnya yang diperoleh. Berikut adalah data perkembangan NPL pada Bank Rakyat Indonesia Unit Syamsudin Noor pada periode Desember 2014 - 2015.

**Tabel 1. Kredit yang Disalurkan dan Perkembangan NPL PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor Per Desember 2014 – 2015**

No	Jenis Kredit	Kredit yang Disalurkan				NPL			
		(Rp)		Org		(Rp)		(%)	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015

1	Kredit Multi Guna	212.731 .169	331.22 5.000	246	303	2.507.61 3	5.716.2 00	1,18	1,73
2	Kredit Surat perintah Kerja (SPK)	310.704 .202	380.39 2.963	66	74	15.927.3 11	28.273. 920	5,13	7,43
3	Kredit Rekening Koran (Kredit Umum)	1.763.7 38.730	1.892.4 97.706	206	201	44.228.0 00	46.447. 299	2,50	2,45
4	Kredit Peduli Usaha Mikro	4.410.9 24.034	3.133.6 15.243	111	89	51.684.3 45	55.996. 762	1,17	1,79
5	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	977.188 .257	943.73 5.855	85	61	60.527.5 36	70.536. 908	6,2	7,47
6	Kredit Angsuran Lainnya (KAL)	97.973. 033	110.83 6.547	27	47	7.589.23 4	3.387.3 40	7,75	3,05
	<b>Total</b>	<b>6.009.5 20.695</b>	<b>6.792.3 03.314</b>	<b>741</b>	<b>775</b>	<b>321.464. 039</b>	<b>325.35 8.429</b>	<b>23,93</b>	<b>23,92</b>

**Sumber : PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor (data diolah)**

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor berhasil menyalurkan kredit KUR mikro sebesar Rp. 977.188.257 dengan nilai NPL Rp 60.527.536,- yang disalurkan kepada 85 orang debitur dengan nilai NPL 6,2%. Sementara untuk tahun 2015 dapat dilihat bahwa persentase NPL KUR pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor sangat tinggi yaitu 7,47%. Sementara untuk jenis kredit SPK juga mengalami kenaikan yaitu

untuk tahun 2014 sebesar 5,13% dan tahun 2015 sebesar 7,43%. Untuk jenis kredit KAL tahun 2014 sebesar 7,75% dan tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 3,05%. Tingginya tingkat NPL terhadap Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Surat Perintah Kerja (SPK) dalam jangka dua tahun terakhir yang melebihi batas sesuai dengan ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu hanya 5%, maka pemberian fasilitas KUR mikro dihentikan sementara pada Unit Kerja tersebut.

PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor dalam mewujudkan tujuan khususnya dalam penyaluran kredit, yaitu manajemen PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor sering dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Agar manajemen bank dapat mengambil suatu keputusan pemberian kredit, manajemen harus mempunyai informasi akuntansi yang baik. Dalam kegiatan pemberian kredit pihak PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor menetapkan sistem informasi akuntansi dan syarat yang harus diikuti oleh calon nasabah yaitu dengan menganalisa setiap permohonan kredit yang masuk sebelum akhirnya dilakukan pemberian proses yang lebih lanjut.

Kenyataannya dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi pemberian kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor terdapat beberapa kendala yaitu dari struktur organisasi fungsi yang terkait keputusan

pemberian kredit oleh Bagian kredit dalam melakukan verifikasi data, wawancara langsung dengan calon nasabah, dan melakukan transaksi agunan sementara aktivitas tersebut juga dilakukan oleh bagian *customer service*, hal ini dapat menyebabkan *double data* verifikasi dalam sistem informasi. Dari unsur dokumen yang mendukung, syarat-syarat penggunaan dokumen dalam pengajuan permohonan kredit, seperti: Identitas calon debitur, gambaran usaha yang dimiliki, bukti kepemilikan jaminan, rencana penggunaan dana kredit, laporan keuangan, dan rekenig koran. Pada tahapan ini terdapat syarat data yang terlewatkan yang tidak diminta oleh *customer service*, yaitu data yang berkenan dengan usaha debitur seperti data supplier, sistem pembelian, daftar pelanggan dan sistem penjualan. Data ini perlu untuk memperoleh informasi tambahan dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan usaha calon nasabah.

Sementara catatan akuntansi yang digunakan dalam hal penetapan kolektibilitas kredit di PT BRI

(Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor sudah sangat rapi yaitu sesuai dengan catatan daftar posisi kredit yang terdiri dari : 1) Lancar (L) kredit yang tingkat pembayaran tepat waktunya dan tidak ada tunggakan. 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK) kredit yang terdapat tunggakan pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari. 3) Kurang Lancar (KL) kredit yang terdapat tunggakan angsuran pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 91 hari sampai dengan 180 hari. 4) Diragukan (D) kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 181 hari sampai dengan 270 hari. 5) Macet (M) kredit yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 271 hari sampai dengan 360 hari.

Kegiatan pemberian perkreditan bank akan baik apabila dalam perusahaan terdapat sistem yang baik. Sistem akan berjalan dengan baik apabila terdapat informasi akuntansi yang baik pula. Sistem informasi akuntansi yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan-

tujuan yaitu: 1) menjaga kekayaan dan catatan organisasi; 2) mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi; 3) mendorong efisiensi; dan 4) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan sistem informasi pemberian kredit yang komprehensif. Sistem informasi pemberian kredit yang dilakukan oleh PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor merupakan hal yang penting dalam usaha perbankan. Tujuan dari analisis pemberian kredit ini untuk menjaga, mengamankan dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan yang dapat menjadikan kredit bermasalah dan jika tidak ditindak-lanjuti akan menyebabkan kerugian bagi Bank. Serta dengan adanya sistem ini, pihak Bank dapat mengetahui dengan cepat munculnya potensi kredit bermasalah yang dapat merugikan Bank.

## **METODE**

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif

kualitatif pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor memiliki komitmen untuk memberikan kemudahan penyaluran kredit sebagai tambahan modal usaha bagi pengusaha mikro. Fenomena kemudahan pemberian kredit pada PT BRI (Tbk) Kantor Unit Syamsudin Noor menimbulkan sebuah masalah, yaitu dari struktur organisasi fungsi yang terkait dalam putusan pemberian kredit Bagian kredit melakukan verifikasi data, wawancara langsung dengan calon nasabah, dan melakukan transaksi agunan sementara aktivitas tersebut juga dilakukan oleh bagian customer service, hal ini dapat menyebabkan *double* data verifikasi dalam sistem informasi. Dari unsur dokumen yang mendukung, syarat-syarat penggunaan dokumen dalam pengajuan permohonan kredit, seperti: Identitas calon debitur, gambaran usaha yang dimiliki, bukti kepemilikan jaminan, rencana penggunaan dana kredit, laporan

keuangan, dan rekenig koran. Pada tahapan ini terdapat syarat data yang terlewatkan yang tidak diminta oleh *customer service*, yaitu data yang berkenan dengan usaha debitur seperti data supplier, sistem pembelian, daftar pelanggan dan sistem penjualan. Data ini perlu untuk memperoleh informasi tambahan dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan usaha calon nasabah.

Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Secara umum jenis kredit yang ditawarkan (Kasmir; 2004:41) meliputi: 1. Kredit investasi, merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal; 2. Kredit Modal Kerja, merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha dan biasanya berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari satu tahun; 3. Kredit Perdagangan, merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan perdagangannya; 4. Kredit



Produktif, merupakan kredit yang diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai; 5. Kredit Konsumtif, merupakan kredit yang digunakan oleh pribadi untuk keperluan konsumtif; 6. Kredit Profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Sedangkan secara spesifik jenis produk kredit yang ditawarkan PT BRI (Tbk) Kantor Unit Syamsudin Noor yaitu: Kredit Multi Guna (KMG), Kredit Surat perintah Kerja (SPK), Kredit Rekening Koran (Kredit Umum), Kredit Peduli Usaha Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Angsuran Lainnya (KAL)

Setiap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit terhadap debitur pasti akan menghadapi suatu risiko. Siamat (2005:279) menyatakan “risiko usaha atau *business risk bank* merupakan tingkat ketidakpastian mengenai pendapatan yang diperkirakan akan diterima. Pendapatan dalam hal ini adalah

keuntungan bank. Semakin tinggi ketidakpastian pendapatan yang diperoleh suatu bank, semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang diinginkan.”

*Non Performing Loan* (NPL) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001). Sementara itu, Siamat (2005:358) menyebutkan “bahwa kredit bermasalah atau *problem loan* dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur”. Menurut Kasmir (2011: 128), “pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh suatu bank”.

Berdasarkan uraian di atas penggunaan variabel NPL mencerminkan risiko kredit. Semakin tinggi tingkat NPL maka semakin besar pula risiko kredit yang

ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPL perbankan akan lebih berhati-hati (selektif) dalam menyalurkan kredit. Hal ini dikarenakan adanya potensi kredit yang tidak tertagih. Tingginya NPL akan meningkatkan premi risiko yang berdampak pada tingginya suku bunga kredit. Suku bunga kredit yang terlampaui tinggi akan mengurangi permintaan masyarakat akan kredit. Tingginya NPL juga mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal bank ikut terkikis.

Pemberian kredit pada PT BRI (Tbk) Kantor Unit Syamsudin Noor perlu menerapkan suatu sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang memadai guna meminimalisir segala kemungkinan negatif yang mungkin terjadi, seperti terjadinya kecurangan atau penyelewengan dalam proses pemberian kredit, baik itu yang bersifat akuntansi maupun administrasi, sehingga kredit yang diberikan dapat tepat pada sasaran dan terjaminnya pengembalian kredit yang tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian, baik pokok dan ataupun bunganya. Selain itu, sistem

informasi pemberian kredit yang baik akan membantu mengendalikan dalam hal personel yang kompeten dan dapat dipercaya, pemisahan tugas yang memadai, prosedur otorisasi yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, kontrol fisik aktiva dan catatan, serta pemeriksaan pekerjaan secara independent. Sistem informasi akuntansi dalam bidang perkreditan ini dimulai sejak tahap permohonan kredit sampai dengan saat penerimaan kas atas angsuran kredit.

Sebelum realisasi kredit dilaksanakan, pengelola bank haruslah mampu mengestimasi kelancaran pengembalian kredit dan pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian kredit. Disamping itu perlu dilakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur untuk mengetahui besarnya pendapatan atau penghasilan agar bank dapat terhindar atau menekan sekecil mungkin terjadinya resiko kredit macet (*Non Performing Loan*).

Kredit bermasalah disebabkan oleh dua faktor yang dapat dibedakan sebagai berikut:

Faktor Internal: kredit bermasalah berhubungan dengan kebijakan dan strategi yang ditempuh; dan Faktor Eksternal: kredit bermasalah yang terkait dengan kegiatan usaha debitur yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah.

### **Sistem Informasi Pemberian Kredit**

Bank dalam memberikan kredit kepada nasabah harus mempunyai Sistem Informasi yang baik agar tidak terjadi suatu kecurangan dan mencatat setiap transaksi yang terjadi langsung dari dokumen secara teliti pada saat terjadinya. Tahap-tahap Sistem Informasi pemberian kredit yaitu tahap permohonan kredit, tahap penyidikan dan analisis, tahap keputusan persetujuan atau penolakan kredit, tahap pencairan kredit, tahap administrasi, tahap pengawasan dan pembinaan dan tahap pelunasan kredit.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai bank pemerintah yang telah lama berdiri juga turut meramaikan pasar kredit konsumtif yang bisa dipilih oleh nasabahnya yang terdiri dari Kredit

Multi Guna (KMG), Kredit Surat perintah Kerja (SPK), Kredit Rekening Koran (Kredit Umum), Kredit Peduli Usaha Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Angsuran Lainnya (KAL). Sebagai pemberi kredit PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor memberikan berbagai kemudahan pelayanan. Kemudahan pelayanan yang diberikan tersebut dapat memberikan dampak positif baik bagi masyarakat yang membutuhkan kredit maupun bagi perusahaan (PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor). Adapun dampak positif tersebut dapat memberikan keuntungan yang besar pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor karena semakin banyaknya nasabah yang menggunakan fasilitas kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor.

Selain dampak positif, pemberian kredit juga bisa memberikan dampak negatif bagi bank, mengingat kredit yang disalurkan memiliki risiko yang relatif besar. Untuk mengantisipasi, manajemen bank

harus teliti dan selektif dalam memberikan kredit pada nasabah. Hal ini tidak lepas dari sistem informasi akuntansi yang harus benar-benar efisien dan efektif dalam menganalisis pemberian kredit dari nasabah dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai bahan pertimbangan, yaitu besarnya jumlah kredit yang diminta, tujuan penggunaan kredit, bentuk dan nilai jaminan yang diberikan serta beberapa pertimbangan lain yang diperlukan.

Dampak negatif atau risiko yang sering terjadi pada pemberian kredit adalah terjadinya kredit macet. Kredit macet merupakan tidak terbayarnya kembali kredit yang diberikan, baik sebagian maupun seluruhnya yang berakibat pada penurunan tingkat kesehatan operasi bank. Selain terjadinya kredit macet, permasalahan yang timbul pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor adalah dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi pemberian kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor terdapat beberapa kendala yaitu dari unsur fungsi yang

terkait putusan pemberian kredit. Bagian kredit melakukan verifikasi data, wawancara langsung dengan calon nasabah, dan melakukan transaksi agunan sementara aktivitas tersebut juga dilakukan oleh bagian customer service, hal ini dapat menyebabkan double data verifikasi, dari unsur dokumen terdapat syarat data yang terlewatkan yang tidak diminta oleh customer service, yaitu data yang berkenaan dengan usaha debitur seperti data supplier, sistem pembelian, daftar pelanggan dan sistem penjualan, dan tingkat non performing loan melebihi batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemberian kredit yang disalurkan kepada debitur memerlukan adanya suatu sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang baik. Sistem informasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian internal perusahaan, di mana untuk mencegah perusahaan dari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan, serta terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat, sehingga segala aktivitas dan transaksi yang ada dalam perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai

prosedur maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemberian kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor perlu menerapkan suatu sistem informasi akuntansi pemberian kredit yang memadai guna meminimalisir segala kemungkinan negatif yang mungkin terjadi, seperti terjadinya kecurangan-kecurangan atau penyeleweng-penyelewengan dalam proses pemberian kredit, baik itu yang bersifat akuntansi maupun administrasi, sehingga kredit yang diberikan dapat tepat pada sasaran dan terjaminnya pengembalian kredit yang tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian, baik pokok dan ataupun bunganya.

Selain itu, sistem informasi yang baik akan membantu mengendalikan dalam hal personel yang kompeten dan dapat dipercaya, pemisahan tugas yang memadai, prosedur otorisasi yang tepat, dokumen dan catatan yang memadai, kontrol fisik aktiva dan catatan, serta pemeriksaan pekerjaan secara independent. Pengendalian dalam bidang perkreditan ini dimulai sejak

tahap permohonan kredit sampai dengan saat penerimaan kas atas angsuran kredit.

Secara luas telah diketahui bahwa Prosedur Pemberian Kredit Usaha pada bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pertumbuhan ekonomi. Salah satu kegiatan bank adalah perkreditan, dimana perkreditan ini merupakan kegiatan terbesar yang memberikan kontribusi pendapatan paling banyak bagi perbankan. Pendapatan dari pemberian kredit dapat berupa bunga, provisi komisi, *commitment fee*, *appraisal fee*, dan lain-lain.

PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor mempunyai prosedur yang telah memenuhi standar ketentuan umum pemberian kredit. Prosedur yang telah diterapkan oleh PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor mempunyai tahap-tahap sebagai berikut: a. Prosedur permohonan kredit; b. Prosedur penyelidikan dan analisis kredit; c. Prosedur persetujuan permohonan kredit; d. Prosedur pencairan fasilitas kredit; dan; e. Prosedur pengawasan kredit

Pengawasan kredit pada prosedur pemberian kredit usaha PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor adalah memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari aktivitas pinjaman yang diberikan oleh bank telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga tingkat kolektibilitas pinjaman juga baik. Didukung pula dengan adanya struktur organisasi yang dengan jelas menggambarkan pemisahan fungsi, dan dilakukan analisa 5-C sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh pihak Bank Indonesia. Bank juga melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap kredit usaha yang diberikan. Analisa pengendalian internal yang dilakukan PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor memiliki peran di bidang perkreditan, sehingga tetap berada pada tingkat kolektibilitas lancar dan risiko kredit dapat ditekan.

Sistem pengawasan yang dilakukan PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor merupakan suatu prosedur atau usaha-usaha yang dilakukan untuk

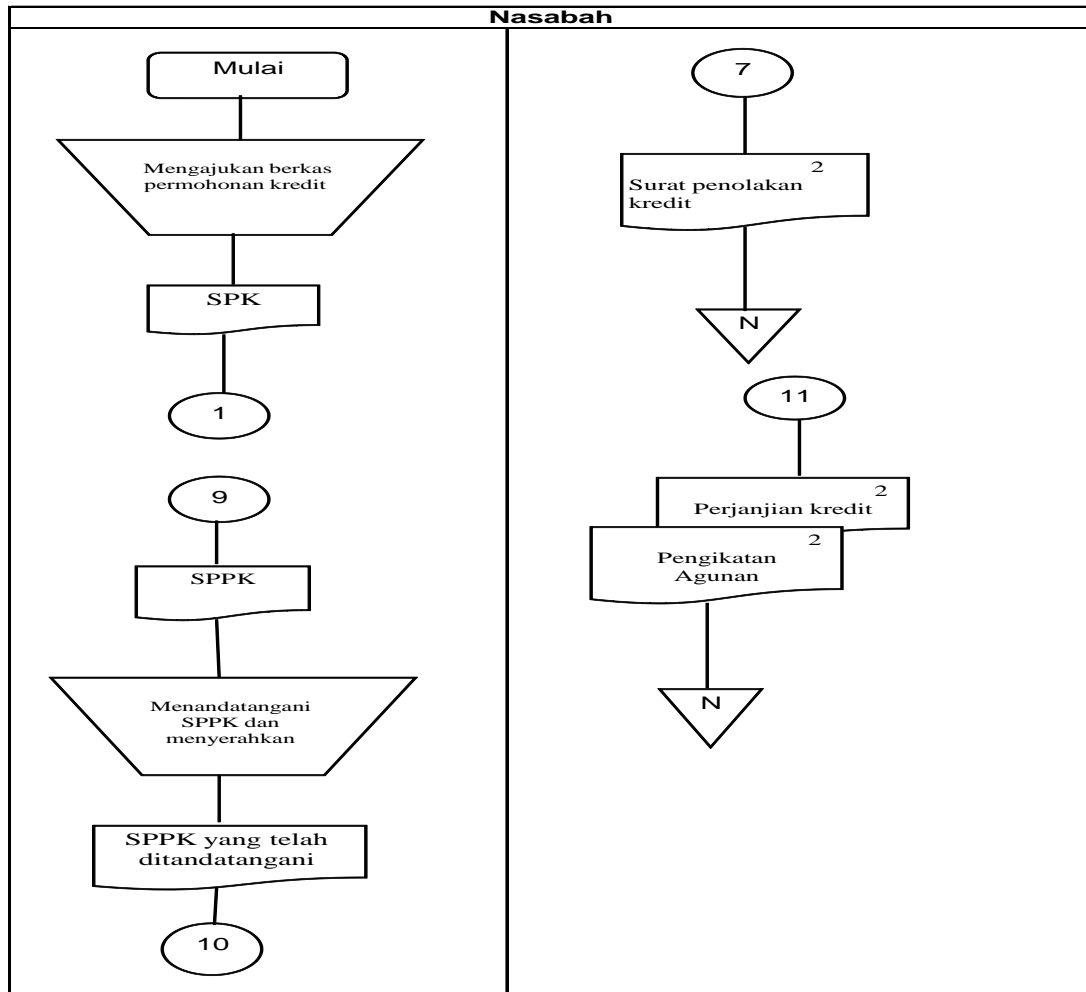
menjaga agar kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bank, yang bertujuan untuk mencapai kredit yang sehat. Proses pengawasan kredit dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian kredit dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberian kredit.

Pelaksanaan struktur organisasi PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor masih terdapat beberapa kelemahan yaitu adanya perangkapan tugas. Hal ini disebabkan PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor masih kekurangan pegawai pada saat ini, sehingga bagian *Customer Service* juga melakukan tugas *Account Officer* yang juga disebut dengan Bagian kredit. Menurut fungsinya bagian *Account Officer* adalah menganalisa usulan putusan kredit agar kredit yang diberikan tepat sasaran dan aman bagi PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor. Sementara bagian *customer service* hanya melakukan pendokumentasian.

Berikut ini dapat bagan *flowchart* untuk sistem administrasi kredit yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan

pencairan kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor :

Flowchart Permohonan Kredit Pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor



Sumber : Diolah kembali, 2015

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Sistem pemberian kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu

diperbaiki guna meningkatkan sistem informasi pemberian kredit, sebagai berikut:

1. Analisis Terhadap Unit Organisasi Yang Terkait Dalam Sistem

Informasi Pemberian Kredit Perusahaan.

Unit organisasi yang terkait dalam Sistem Informasi pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) Unit Syamsudin Noor terdiri dari Bagian Kredit, Pimpinan, Bagian Kasir, dan Bagian Pembukuan baik prosedur permohonan kredit maupun prosedur pinjaman.

Bagian tersebut sudah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam analisis terhadap organisasi yang terkait dengan prosedur angsuran pinjaman adalah petugas angsuran masih melakukan dua tugas yaitu menerima uang dari nasabah dan membuat SPKK. Dengan adanya perangkapan tugas ini dapat mengakibatkan adanya perubahan catatan akuntansi pada SPKK dengan jumlah uang yang diterima tidak sama.

Dari analisis mengenai unit organisasi yang terkait dengan Sistem Informasi pemberian kredit diatas, diharapkan kiranya

dapat dilakukan perbaikan sebagai berikut :

- a. Sebaiknya petugas angsuran (bagian kredit) hanya bertugas membuat SPKK kemudian diserahkan kepada bagian tersendiri. Dengan demikian perlu ditambah satu unit organisasi yang terkait dengan prosedur angsuran pinjaman yaitu Bagian Penagihan.
2. Berkaitan dengan Analisis terhadap dokumen-dokumen yang digunakan dalam Sistem Informasi pemberian kredit yaitu : SPK, SKPP, PAK, SKK, diharapkan sebagai berikut :
  - a. Sebaiknya SPK dan SKPP bernomor urut tercetak yang dapat digunakan untuk pengendalian atas hilangnya dokumen dan sebagai alat bantu penempatan dokumen jika diperlukan di kemudian hari serta agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Sebaiknya PAK membahas mengenai jaminan keselamatan terhadap barang yang telah dijaminkan oleh nasabah misalnya asuransi barang



jaminan yang bisa menjamin keselamatan barang jaminan yang diserahkan nasabah serta sebaiknya PAK ditandatangani di atas materai karena apabila PAK ditandatangani di atas materai maka kekuatan hukumnya lebih kuat.

SKK sebaiknya berisikan pernyataan dari nasabah mengenai barang jaminan yang diserahkan beserta buktinya.

- c. Analisis terhadap pembukuan yang digunakan dalam Sistem Informasi Pemberian Kredit Perusahaan.
3. Analisis dari catatan akuntansi yang digunakan dalam Sistem Informasi pemberian kredit adalah sebagai berikut:
- a. Sebaiknya CRS dibuat dalam format berbentuk kolom dan bernomor urut tercetak serta dipisahkan antara MAK dengan PTK. Jika Formatnya berbentuk kolom maka akan lebih efisien dalam pembuatannya dan hubungan antar dokumen sumber tertentu sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasinya dapat

ditentukan atau ditelusur dengan cepat.

- b. Sebaiknya jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dengan penerimaan kas haruslah terpisah untuk memudahkan dalam pencocokan antara bagian-bagian yang terkait dengan pemberian kredit yaitu sub bagian Kasir dengan bagian pembukuan, maka perlu dibuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas alasan kenapa sebaiknya jurnal umum harus dipisahkan yaitu untuk dapat mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama yang frekuensi terjadinya tinggi, untuk mengurangi pekerjaan pembukuan ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat, serta untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh beberapa orang dan untuk menciptakan pengawasan.

- c. PTK sebaiknya ada tanda tangan bagian penagihan, kasir, sub bagian kasir dan pimpinan sehingga kalau ada kesalahan catatan bias dilacak kebenarannya dan mencegah terjadinya penyalahgunaan uang milik nasabah.
  - d. Sebaiknya sistem pencatatan menggunakan akrual basis yaitu (*system* pencatatan yang mengakui pendapatan dan pengeluaran tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau sudah dikeluarkan) karena sistem pencatatan berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan serta pengukuran kinerja.
4. Analisis Terhadap Sistem Otorisasi Dalam Sistem Informasi Pemberian Kredit.

Mengingat pentingnya otorisasi dalam menjalankan operasi perbankan maka dalam sebuah organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas

terlaksananya setiap transaksi. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor telah mengadakan pencatatan atas transaksi, setiap sub bagian tidak bertugas mencatat transaksi dari data aslinya melainkan copiannya sehingga dalam pembukuannya ke dalam rekening buku besar yang bersangkutan menggunakan bukti copian. Dengan cara memisahkan tugas pencatatan tersebut maka bagian yang satu dapat saling mengontrol bagian yang lain secara otomatis, sehingga terciptanya perlindungan yang baik terhadap kekayaan, uang, pendapatan dan biaya perusahaan.

Adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai terhadap aktivitas bank maka perlu adanya prosedur otorisasi yang harus layak, artinya perlu adanya pemisahan petugas otorisasi transaksi dengan petugas penyimpanan dan pengeluaran kas. Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor antara tugas otorisasi dengan tugas

penyimpanan harta sudah terdapat adanya pemisahan fungsi yaitu:

- a. Bagian kredit hanya akan membuat dokumen-dokumen jika pengajuan kredit dari debitur mendapat persetujuan dan otorisasi dari pimpinan tersebut berdasarkan pada data-data calon debitur yang dapat dipercaya maka akan mengurangi terjadinya kecurangan.
- b. Sub bagian kasir yang bertugas memegang uang hanya mengeluarkan kas untuk memberikan kredit kepada debitur apabila adanya otorisasi dari Pimpinan. Otorisasi tersebut berupa penyerahan dokumen yang telah ditandatangani oleh pimpinan dan bagian kredit.
- c. Analisis penulis terhadap otorisasi dalam Sistem Informasi Pemberian Kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor, SKPP hanya ditandatangani oleh bagian kredit belum diotorisasi oleh bagian kasir dan

pimpinan, dari kelemahan ini disarankan SKPP sebaiknya ditandatangani Juga oleh Pimpinan, Kasir, sehingga jika ada kesalahan catatan bisa dilacak kebenarannya dan mencegah terjadinya penyalahgunaan uang milik nasabah.

### **Saran**

Saran yang disampaikan terkait hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor melakukan penambahan untuk staf bagian tertentu (bagian administrasi) yang belum terisi agar sistem dan prosedur pemberian kredit perberjalan dengan baik atau untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.
2. Hendaknya pihak yang berwenang pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Syamsudin Noor melakukan pemeriksaan mendadak untuk memeriksa semua data-data yang dibuat

oleh karyawan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang bertujuan agar setiap karyawan melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah siap apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan mendadak.

3. Hendaknya dalam praktek pelaksanaannya, Bagian Kredit harus melakukan kunjungan langsung (*On The Spot*) ke tempat calon debitur walaupun dengan risiko seperti lokasi usaha atau tempat tinggal debitur terlalu jauh atau sulit untuk diakses.

#### DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, 2001. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI)*, Revisi 2001, Jakarta

Hasibuan, Malayu, 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Pertama, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Bank Indonesia, 2001. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001*.  
www.bi.go.id.

Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama, Penerbit BPFE, Yogyakarta

Bank Indonesia, 2004. *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004*. www.bi.go.id.

Abdullah, Faisal, 2005. *Manajemen Perbankan*, Cetakan Ketiga, UMM Press, Malang.

Gusnita, Sari. 2008. *Analisis Kredit Ditinjau Dari Posisi Non Performing Loan Pada Bank Mandiri Cabang Medan*. Universitas Sumatera Utara : Medan

Mulyadi. 2008. *Auditing*. Edisi Enam. Jakarta: Salemba Empat.

Kasmir, 2011. *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta